

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan suatu hal yang penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan daerah juga merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah seperti, meningkatkan pendapatan daerah, kesempatan bekerja dan lapangan usaha. Pembangunan daerah merupakan bagian terpenting dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pembangunan daerah juga berarti memampukan daerah untuk mengelolah sumber daya ekonominya guna untuk kemajuan dan kesejahteraan ekonomi daerah, maka dalam hal ini dilakukan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi menjadi suatu hal yang sangat penting dalam suatu pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kondisi perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi yang merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu negara atau wilayah karena berkaitan erat dengan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini diukur dalam jangka panjang dengan menggunakan output perkapita dari produk domestik regional bruto perkapita.

Berbicara mengenai pembangunan ekonomi berarti di dalamnya terdapat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam satu kurun waktu tertentu. Dengan adanya pembangunan ekonomi bisa jadi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan begitu pula sebaliknya dengan adanya pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar pembangunan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka dapat diharapkan menyerap tenaga kerja yang ada sehingga kesejahteraan pada masyarakat dapat meningkat.

Sejak adanya era reformasi pada tahun 1998 pemerintah mencoba pemeratakan pembangunan keseluruhan daerah baik di daerah maupun di provinsi melalui otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak dan kewenangan daerah dalam mengatur pemerintahannya sendiri. Menurut uu no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dalam perkembangannya di perbaharui dengan uu no. 32/2004 tentang otonomi daerah yaitu dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan keuangan daerah.

Tujuan utama dari pemberlakuan sistem otonomi daerah tersebut adalah untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menambah kekuatan fiskal daerah melalui program andalan daerah sehingga mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Salah satu upaya yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah tersebut adalah dengan melakukan strategi penataan pada keuangan daerah dan anggaran daerah.

Masalah yang sering terjadi pada pembangunan ekonomi terdapat pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki daerah untuk menggunakan sumber daya yang ada. Setiap wilayah memiliki sumber daya yang berbeda-beda dengan wilayah yang lain, karena perbedaan itulah yang menyebabkan tidak meratanya pembangunan antara masing-masing wilayah. Pembangunan hanya berkonsentrasi pada daerah tertentu sehingga terjadi kesenjangan antara atau wilayah. Ketidakmerataan pembangunan ini dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu yang menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah produk domestik regional bruto (PDRB). Produk domestik regional bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi suatu daerah.

Menurut Sanusi (2003:41) besaran PDRB menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki menjadi suatu proses produksi. Berkaitan dengan itu, maka besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut.

Pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi yang tidak bisa lepas bagi peran belanja daerah disektor layanan publik. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk mengelola sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Pengelolaan keuangan daerah tidak bisa lepas dari pengelolaan anggaran penerimaan dan

pengeluaran daerah sehingga anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjadi relevan dan penting bagi pemerintah daerah. APBD seharusnya dikelola dengan baik dan dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan dicapainya tujuan daerah yang telah ditetapkan dapat diketahui kinerja suatu pemerintah daerah. Selain itu juga memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya kedalam belanja daerah yang dialokasikan kedalam APBD.

APBD sendiri tersusun atas komponen penerimaan daerah dan belanja daerah. Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan bagian dari sumber-sumber pendapatan daerah. Sedangkan pengeluaran daerah yang dilakukan berupa belanja daerah. Pemerintah daerah juga memiliki sumber penerimaan sendiri berupa pendapatan asli daerah (PAD), pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Salah satu penerimaan pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi salah satu bagian dari pertumbuhan ekonomi. PAD adalah sumber penerimaan utama bagi suatu daerah. Perimaan PAD yang semakin bertambah diharapkan dapat meningkatkan anggaran belanja modal pemerintah daerah. Sumber-sumber utama PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dan lain-lain PAD yang disahkan.

Dalam memperoleh PAD pemerintah dituntut untuk mengoptimalkan dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki wilayah-wilayah daerah. Masalah yang sering muncul adalah pemerintah tidak bisa memprediksi penerimaan daerah

secara akurat sehingga belum dapat dipungut secara optimal. Melalui UU No.33 Tahun 2004 pemerintah diharapkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam memperoleh dana. Peningkatan PAD dianggap sebagai modal yang dimiliki daerah yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. PAD menjadi tulang punggung yang dimiliki daerah untuk membiayai belanja daerah. Semakin tinggi PAD yang dimiliki daerah maka semakin tinggi pula belanja modal yang dilakukan daerah, sehingga dapat dilihat bahwa PAD dan belanja modal memiliki hubungan yang baik dan positif.

Berikut ini merupakan tabel data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Manggarai Timur tahun 2009-2021.

Tabel 1.1

Data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 – 2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi
	Miliar Rupiah	Miliar Rupiah	%
2009	3.906.296.898	53.843.417.418	5,23
2010	8.484.377.334	119.010.331.907	4,47
2011	12.868.278.166	201.106.923.088	4,46
2012	15.266.657.498,21	225.226.844.264	5,67
2013	19.056.499.176,18	141.473.432.526,00	5,3
2014	22.053.561.300,68	132.676.518.463,00	11,14
2015	41.465.748.921,64	184.827.005.073,00	5,10
2016	44.112.085.695,10	201.017.329.654,00	5,11
2017	85.878.937.144,71	191.426.688.686,00	5,08
2018	44.007.083.306,37	215.578.923.416,04	5,00
2019	54.434.713.623,57	273.777.797.528,72	4,96
2020	47.552.521.548,57	180.154.629.304,00	0,82
2021	44.168.186.981,76	243.476.296.368,00	2,29

Sumber : BKD dan BPS Kabupaten Manggarai Timur Dalam Angka 2023

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal yang di dapat oleh daerah tersebut. Berdasarkan tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Timur sembilan tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu dari tahun 2009-2017. Pada tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Timur sebesar Rp 3.906.296.898. Dan pada tahun 2010 mulai mengalami peningkatan sebesar Rp 8.484.377.334. Dan pada tahun 2011 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp 12.868.278.166. Pada tahun 2012 menunjukkan kenaikan yang cukup besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 15.266.657.498,21. Pada tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Timur mencapai Rp 19.056.499.176,18 lebih tinggi dari pencapaian dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2014-2017 Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Manggarai Timur mengalami peningkatan yang cukup besar dari empat tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 22.053.561.300,68 tahun 2014, sebesar Rp 41.465.748.921,64 di tahun 2015, sebesar Rp 44.112.085.695,10 di tahun 2016 dan sebesar Rp 85.878.937.144,71 di tahun 2017. Pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Timur mengalami penurunan sebesar Rp 44.007.083.306,37. Dan pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 54.434.713.623,57. Dan pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 47.552.521.548,57 di tahun 2020 dan sebesar 44.168.186.981,76 di tahun 2021.

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat pula faktor lain yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi yaitu Belanja Modal. Dari tabel 1.1 di atas

dapat dilihat bahwa Belanja Modal di Kabupaten Manggarai Timur tergolong fluktuasi. Perkembangan Belanja Modal di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2009 sebesar Rp 53.843.417.418. Pada tahun 2010-2012 mulai mengalami peningkatan sebesar Rp 119.010.331.907 di tahun 2010, sebesar Rp 201.106.923.088 di tahun 2011 dan sebesar Rp 225.226.844.264 pada tahun 2012. Dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan yg cukup besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 141.473.432.526,00 dan pada tahun 2014 Belanja Modal di Kabupaten Manggarai Timur mengalami penurunan sebesar Rp 132.676.518.463,00 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp 184.827.005.073,00 di tahun 2015 dan sebesar Rp 201.017.329.654,00 di tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 Belanja Modal di Kabupaten Manggarai Timur mengalami penurunan sebesar Rp 191.426.688.686,00 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp 215.578.923.416,04 di tahun 2018 dan sebesar Rp 273.777.797.528,72 pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 Belanja Modal di Kabupaten Manggarai Timur mengalami penurunan sebesar Rp 180.154.629.304,00 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar Rp 243.476.296.368,00.

Sebagai fokus penelitian, penelitian yang pernah dilakukan oleh Wardiah (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh” bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi sedangkan Belanja Modal tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, artinya semakin meningkatnya dana alokasi Belanja Modal maka secara langsung Belanja Modal tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan

Ekonomi dan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fajri (2016) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera” bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Manggarai Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2009-2021?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2009-2021?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2009-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberi gambaran Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2009-2021.

2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2009-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara simultan (bersama-sama) terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2009-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Apabila tujuan dari penelitian ini tercapai maka diharapkan dapat mempunyai manfaat bagi :

1. Bagi Pemerintahan Kabupaten

Sebagai sumber informasi kepada kabupaten Manggarai Timur mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Bagi Pengembangan Ilmu

Sebagai sumbangan bagi ilmu ekonomi pembangunan khususnya tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, khususnya kabupaten Manggarai Timur.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan bahan referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya